

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Public Service Broadcasting didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan universalitas, keragaman program, yang mengutamakan kepentingan publik. Akar *Public Service Broadcasting* umumnya dapat ditelusuri dari dokumen Royal Charter tentang pembentukan British Broadcasting Corporation (BBC) pada tanggal 1 Januari 1927. Dokumen tersebut memuat tentang penciptaan sebuah perusahaan publik yang akan berfungsi sebagai wali amanat bagi kepentingan nasional di bidang penyiaran¹. Terbentuknya *Public Service Broadcasting* merupakan kebutuhan bagi tegaknya demokrasi di suatu negara. Media penyiaran swasta komersial memang mampu mengakomodasi kebebasan berekspresi, namun sulit bagi media penyiaran swasta komersial untuk memosisikan diri netral dan independen. Faktor ekonomi politik media dan tekanan industri menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dinamika dan isi media untuk pencapaian kepentingan tertentu. Kondisi ini yang menyebabkan pentingnya kebutuhan akan media yang benar-benar berorientasi pada publik.

Terdapat tiga kategori media penyiaran publik berdasarkan sumber pendanaannya.

¹Diambil dari artikel berjudul "*Public Service Broadcasting*"
<http://www.museum.tv/archives/etv/P/htmlP/publicservicb/publicserviceb.htm>)

Pertama, media penyiaran publik yang sumber utama pendanaannya berasal dari dana publik melalui persetujuan parlemen, contohnya BBC (Inggris)², NHK (Jepang)³, dan TVRI (Indonesia). Sedangkan Thai PBS (Thailand)⁴ sumber pendanaannya berasal dari sin tax cukai rokok dan minuman keras. Kedua, media penyiaran publik yang sumber pendanaannya berasal dari dana publik dan juga iklan komersial, seperti ABC (Australia)⁵ dan CBC (Kanada)⁶. Ketiga, media penyiaran publik yang membebankan pendanaannya pada pemasukan iklan komersial dan sponsorship, yakni seperti *France Télévisions* (Perancis)⁷ dan SABC (Afrika Selatan)⁸. Sumber pendanaan menjadi faktor penting karena akan berpengaruh pada dinamika operasional media itu sendiri. Fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya pengabaian layanan publik akibat interupsi iklan komersial dan sponsor. Berdasarkan perbedaan media penyiaran publik di atas, maka peneliti memfokuskan pada Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia, khususnya TVRI.

Di Indonesia, penyiaran publik diperkenalkan pada November, 2002, ketika parlemen mengeluarkan UU Nomor 32/2002 tentang penyiaran. Regulasi tersebut menetapkan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

²Diambil dari Mendel, 2011:84. "*UK PSB Financing*"

³Ibid, 49. "*NHK Financing*"

⁴Ibid, 72. "*Thai PBS Financing*"

⁵Ibid, 25. "*ABC Financing*"

⁶Ibid, 36. "*CBC Financing*"

⁷Ibid, 43. "*France PSB Financing*"

⁸Ibid, 64. "*South Africa PSB Financing*"

Secara Formal TVRI baru dapat memulai pelayanan penyiaran publik di Indonesia pada 18 Maret 2005, tepat setelah pemerintah merilis Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik. Regulasi tersebut mendefinisikan LPP-TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya, LPP memiliki ciri khas yang membedakannya dari Lembaga Penyiaran Swasta. Hal ini dikarenakan lembaga penyiaran swasta lebih berorientasi pada keuntungan komersial melalui program siarannya. Sedangkan program siaran TVRI harus dikemas dengan mengutamakan kepentingan publik. PP No. 11 Tahun 2005 Pasal 4 menekankan bahwa, RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Program siaran yang menjadi ciri khas TVRI adalah program acara layanan publik berupa dialog antarwarga, debat publik, hingga informasi umum tentang keberagaman budaya tanah air.

⁹Diambil dari (<http://www.tvri-digital.net/programunggulan/2012>).

Tahun 2012 hingga 2013 TVRI memiliki program acara⁹ “Dialog Aktual,” “Sosialisasi 4 Pilar,” dan “Pelangi Nusantara.” Selain program acara tersebut, TVRI juga memiliki beberapa program acara unggulan seperti, “Swara Liyan,” tayang pada Selasa pukul 13.00 WIB; Program Motivator, tayang pada Senin-Jumat pukul 20.00 WIB; Musik Keren, tayang pada Senin-Jumat pukul 16.00-17.30 WIB; dan Liga Italia Serie A di TVRI tayang secara LIVE pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin dini hari. Menariknya di antara program acara tersebut, hanya Liga Italia Serie A yang merupakan program acara berasal dari luar negeri. Pemegang hak siar utama Liga Italia Serie A adalah Sky Italia. TVRI dapat menayangkan Liga Italia Serie A karena membeli terrestrial *free to air* hak siar Liga Italia Serie A dari agensi MP & Silva Singapura. Artinya TVRI memegang hak siar eksklusif Liga Italia Serie A untuk TV tidak berbayar di Indonesia dengan durasi kontrak 3 tahun (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015). Sedangkan hak siar Liga Italia Serie A untuk TV berbayar di Indonesia, dipegang oleh Bein TV dan Orange TV.

Dewasa ini, olahraga telah muncul sebagai bagian penting dalam industri media. “Keduanya memiliki hubungan simbiosis mutualisme, olahraga dan media massa terus berusaha menjangkau orang-orang sebagai penonton, penggemar, dan konsumen baik secara aktif mempengaruhi penonton serta pasar iklan (termasuk sponsor)” (Beck and Bosshart, 2003:1). Penjualan hak siar dan penyiaran tayangan sepak bola adalah dua aspek dari kegiatan komersial yang diatur dalam regulasi kompetisi yang bersangkutan. Hal ini karena beberapa kegiatan yang terjadi dalam sistem olahraga bukan hanya

acara hiburan semata, tetapi juga menyiratkan konsekuensi ekonomi yang telah mengubah bentuk olahraga menjadi komoditas, atau yang disebut Colantuoni (2005:6) olahraga profesional semakin komersial.

Direktur Program dan Berita TVRI, Irwan Hendarmin berdalih¹⁰, "kami ingin merebut minat pemirsa. Olahraga merupakan salah satu acara yang paling digemari. Khusus untuk olahraga, sudah ada tiga acara yang disiapkan, yaitu tinju dunia, Olimpiade London dan Liga Serie A." Pernyataan tersebut mengasumsikan minat publik dalam logika yang sama dengan media penyiaran komersial bahwa tayangan olahraga mengakomodasi minat publik mayoritas. Jika media penyiaran swasta mengutamakan tayangan *entertainment* dan sepakbola luar negeri, maka TVRI melayani publik minoritas yang terabaikan. Diantaranya melalui program siaran selain *entertainment* dan sepakbola luar negeri, seperti pendidikan, seni, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang ditulis McQuail (2000) yakni, "program tersebut cenderung diabaikan dalam sistem komersial karena mereka tidak menarik bagi pengiklan. Seluruh gagasan tentang *Public Service Broadcasting*, memiliki fokus program yang kuat pada isu-isu publik, yang rasional, dan perwakilan warga masyarakat, tanpa pengaruh dari kekuatan komersial atau politik pribadi." Jika program acara olahraga menjadi acuan untuk merebut minat publik, lantas tidak ada bedanya TVRI dengan media penyiaran swasta yang juga berebut untung melalui hak siar sepakbola luar negeri.

¹⁰Diambil dari (<http://www.ceritamu.com/Cerita-Olahraga/Artikel/TVRI-Saluran-Resmi-Olimpiade-2012>).

Kondisi ini sangat berpengaruh pada interpretasi publik terhadap TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Satu contoh perdebatan mengenai program siaran Liga Italia di TVRI terjadi pada blog Kompasiana dalam tulisan Edo Karensa yang berjudul ‘TVRI kok menayangkan Serie A?’¹¹. Edo berpendapat dalam blog tersebut bahwa, tayangan Liga Italia Serie A sangat bertentangan dengan UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 yang menetapkan TVRI sebagai LPP. Sementara itu pada kolom komentar, Alfie Eil, memberikan pendapatnya yakni, *“Saya dkung TVRI, 4 Liga besar eropa di tv lokal, tp kalo di daerah2 terpencil semuanya di acak kecuali di tvri, hburan bola mana lg yg bsa ditonton, gak ap2 kok dg begitu dampak APBN Terasa nyata bagi kami2 yg di daerah2, dripda dikorupsi”*.

Audiens dalam Lembaga Penyiaran Publik adalah publik yang terlibat dalam proses demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui layanan penyiaran. Maka program acara Lembaga Penyiaran Publik utamanya memfokuskan diri pada *public interest*, yakni program acara yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik. Program acara Liga Italia Serie A di TVRI merupakan kasus yang menarik untuk dicermati bagaimana audiens memaknai TVRI sebagai LPP. Karena program tersebut sangat tidak relevan disiarkan bagi publik di Indonesia. Hal ini berdasarkan sifat program acara tersebut yang komersial dan merupakan sepakbola dari negara Italia yang sama sekali tidak merepresentasikan identitas nasional.

¹¹Diambil dari (<http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/09/09/tvri-kok-menayangkan-serie-a-485405.html>)

Meskipun demikian, polemik terjadi dalam lokus audiens yang mana contoh komentar audiens di atas, menegaskan bahwa audiens sepakat dengan TVRI dalam penayangan program acara Liga Italia Serie A meskipun bertentangan dengan nilai kebutuhan publik dalam konsep LPP.

Peneliti tertarik untuk melakukan analisis resepsi audiens, sebab, *reception analysis* menekankan audiens sebagai khalayak aktif yang dapat memaknai bahkan mereproduksi pesan. Resepsi audiens model *encoding/decoding* Stuart Hall, memungkinkan kita untuk mengetahui posisi pembacaan audiens terhadap teks, yaitu dominan, negosiasi, dan oposisi. Salah satu riset audiens dengan menggunakan model *encoding/decoding* Stuart Hall adalah riset yang dilakukan oleh David Morley (Ross dan Nightingale, 2003:38) pada tahun 1980 terhadap penonton program acara Nationwide. Ia berfokus pada bagaimana orang-orang dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, memaknai program televisi yang sama.

Selain itu, contoh penelitian resepsi audiens dengan menggunakan *encoding/decoding* model Stuart Hall adalah penelitian yang dilakukan oleh Fellycia Novka, 'Pembacaan Penonton Muslim Terhadap Kode-Kode Dominan Film Perempuan Berkalung Sorban Tentang Gender dan Seksualitas.' Fokus penelitian tersebut adalah penonton Muslim, karena isu gender dan seksualitas dalam film tersebut sangat kontekstual, dan kesamaan latar belakang dalam hal agama menjadi penting untuk memahami isu gender dan seksualitas dalam Islam secara lebih dalam.

Berdasarkan rujukan penelitian yang sudah ada, maka peneliti tertarik untuk menggunakan resepsi audiens model *encoding/decoding* Stuart Hall pada program acara Lembaga Penyiaran Publik. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana interpretasi audiens terhadap program acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik. Program acara di TVRI hakikatnya tersusun atas kode-kode yang didasarkan pada konsep Lembaga Penyiaran Publik. Maka manifestasi konsep LPP menjadi isu penting pada program acara Liga Italia Serie A di TVRI. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya sampai pada pemaknaan dan posisi pembacaan audiens, namun berlanjut kepada isu mengenai tugas dan fungsi TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana audiens memaknai Program Acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan interpretasi audiens terhadap Program Acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi *encoding/decoding* pada analisis tekstual yang berkaitan dengan teks program acara yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik.

2. Manfaat Praktis

- Peneliti memiliki perhatian khusus terhadap audiens publik dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Oleh karena itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menyuarakan wacana tentang Lembaga Penyiaran publik bagi audiens di Indonesia.
- Sedangkan bagi TVRI, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi produksi program acara TVRI agar sesuai dengan prinsip Lembaga Penyiaran Publik.

E. TEORI

1. Resepsi Audiens

Resepsi audiens berasal dari penelitian audiens dalam genre komunikasi untuk menjelaskan *decoding* kelompok audiens dengan membandingkan wacana audiens dan wacana media. Menurut Jensen dan Jankowski (1991:136) analisis resepsi lahir dari gabungan dua tradisi yaitu humaniora dan tradisi efek. Sisi humanioranya yakni melakukan pendekatan teks sebagai lokus makna untuk digali oleh (kurang lebih)

pembaca yang kompeten melalui tindakan hermeneutik yang fokus analisisnya cenderung pada sekitar teks itu sendiri daripada budaya. Sedangkan tradisi efek telah melahirkan penelitian efek terhadap audiens baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karenanya analisis resepsi menunjukkan bahwa audiens dan konteks komunikasi massa harus dianalisis secara sosial dan empiris.

Analisis resepsi berbeda dari studi efek audiens '*Uses and Gratification*.' '*Uses and Gratification*' berusaha untuk mencocokkan konten media dengan respon penonton dan memfokuskan pada peran penonton dengan menekankan penggunaan media untuk kebutuhan sosial dan psikologis audiens. Sedangkan bagi resepsi audiens, pada setiap titik dari proses komunikatif terdapat lingkup ketidakpastian yang memungkinkan untuk beberapa makna potensial dan dampak yang akan dihasilkan. Resepsi juga merupakan tindakan sosial yang berfungsi untuk menegosiasikan definisi realitas sosial dalam konteks praktek-praktek budaya dan komunikatif yang lebih luas.

Resepsi Audiens pada dasarnya menempatkan audiens sebagai agen kultural yang memiliki kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana media. Audiens mengonstruksikan makna dari isi media yang disebut teks. Makna media bukanlah sesuatu yang kaku, teks media hanya memiliki makna ketika terjadi momen resepsi, yakni ketika media dibaca, dilihat, didengarkan, dan diinterpretasikan oleh audiens.

Penggunaan analisis resepsi pada studi audiens dipopulerkan oleh David Morley, yang mempraktikkan analisis resepsi audiens secara mendalam. Pertanyaan utama dalam penelitian Morley adalah bagaimana individu menginterpretasikan muatan program acara televisi dilihat dalam kaitannya dengan latar belakang sosio-kultural audiens. Resepsi audiens yang dilakukan Morley menggunakan model *encoding-decoding* Stuart Hall. Pendekatan *encoding-decoding* dalam resepsi audiens menurut Morley (2005:78) didasarkan pada:

- a) peristiwa yang sama dapat diencodekan dengan lebih dari satu cara;
- b) pesan selalu berisi lebih dari satu potensi 'pembacaan'. Pesan mengusulkan dan memilih bacaan tertentu atas lainnya, tetapi mereka tidak pernah bisa sepenuhnya menutupi satu bacaan: mereka tetap polisemi.
- c) memahami pesan juga merupakan praktik yang problematis, namun mungkin tampak transparan dan 'alami'. Salah satu cara encode pesan dapat selalu dibaca dalam cara yang berbeda.

Pesan televisi diperlakukan sebagai tanda yang kompleks di mana *preferred reading* telah tertulis, tetapi mempertahankan yang potensial, jika audiens mendekodekan teks dengan cara yang berbeda dari cara yang telah diencodekan, maka komunikasi yang dihasilkan akan berbeda

makna. Makna yang dihasilkan oleh pertemuan teks dan subjek tidak dapat 'dibaca langsung dari karakteristik tekstual'. Morley berpendapat bahwa,

The meaning of the text will be constructed differently according to the discourses (knowledges, prejudices, resistance, etc) brought to bear on the text by the reader and the crucial factor in the encounter of audience/subject and text will be the range of discourses at the disposal of the audience (Ibid: 80).

Makna teks akan dikonstruksikan berbeda berdasarkan wacana (pengetahuan, anggapan, pertentangan, dan sebagainya) yang dibebankan pada teks melalui pembaca dan faktor krusial dalam pertemuan antara audiens dan teks akan menjadi wacana audiens. Teks tidak dapat dianggap terpisah dari kondisi historis produksi dan konsumsinya: 'Apa yang harus diidentifikasi adalah penggunaan penempatan teks tertentu, fungsinya dalam dugaan tertentu, di ruang-ruang institusi tertentu, dan dalam kaitannya dengan penonton tertentu'. Dengan demikian makna teks harus memikirkan seperangkat wacana bertemu dalam situasi yang khusus dan bagaimana pertemuan ini bisa merestrukturisasi makna teks dan wacana-wacana yang memenuhinya.

Studi berbasis khalayak menekankan fakta penting bahwa khalayak yang berbeda menggunakan dan menginterpretasikan teks dengan cara yang berbeda dengan yang disampaikan oleh encoder (pembuat teks) dan juga berbeda dengan khalayak yang lain. Hal ini menegaskan peran khalayak dalam mengonstruksikan makna.

Program acara televisi yang sama, dapat menghasilkan makna berbeda bagi tiap audiens, meskipun tayangan tersebut ditonton dalam waktu yang sama. Begitu juga sebaliknya, makna tayangan televisi bisa

berbeda bagi audiens yang sama, jika ditonton dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, resepsi audiens membantu memahami bagaimana audiens yang berbeda latar belakang menginterpretasikan program acara televisi yang sama.

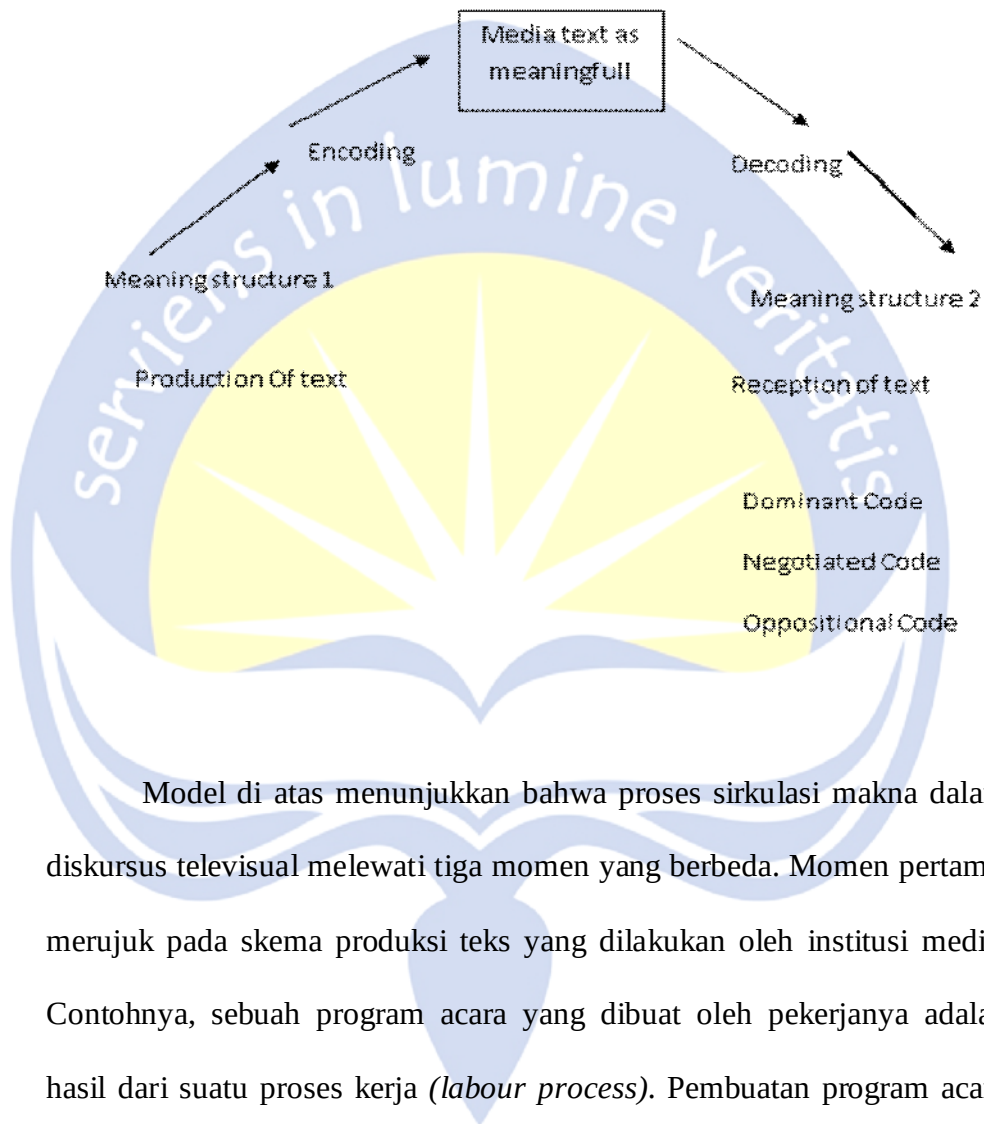
2. *Encoding-Decoding* Stuart Hall

Encoding-decoding adalah model komunikasi yang digagas Stuart Hall sebagai alternatif lain dari alur komunikasi klasik yang berupa *sender-message-receiver*. Dalam model *encoding-decoding*, Hall memberikan penjelasan bahwa alur komunikasi berupa *production-circulation distribution / consumption – reproduction*. Model tersebut menempatkan audiens sebagai khalayak aktif yang dapat memaknai bahkan mereproduksi pesan. Pendekatan *encoding-decoding* Hall berbeda dari pendekatan behavioris komunikasi, sebab ia tidak mengasumsikan adanya kesesuaian langsung antara makna yang dimaksudkan oleh pengirim dengan makna yang ditafsirkan oleh penerima. Hall menyebutnya sebagai '*The codes of encoding and decoding may not be perfectly symmetrical*' (Laughey 2007: 61).

Encoding-decoding adalah proses terpisah, yang mana *encoding* terjadi pada tahap produksi yang mengacu pada proses ideologis, profesional dan teknis yang menginformasikan bagaimana dunia direpresentasikan dalam teks-teks media. Sedangkan *decoding* adalah

proses bagaimana audiens mengonsumsi suatu pesan media. Sebagai contoh model *encoding-decoding* Hall (Durham dan Kelner 2006:165):

GAMBAR 1.
Model Encoding – decoding Stuart Hall



Model di atas menunjukkan bahwa proses sirkulasi makna dalam diskursus televisual melewati tiga momen yang berbeda. Momen pertama, merujuk pada skema produksi teks yang dilakukan oleh institusi media. Contohnya, sebuah program acara yang dibuat oleh pekerjaannya adalah hasil dari suatu proses kerja (*labour process*). Pembuatan program acara tersebut bukanlah tanpa makna dan alasan, melainkan ia memuat makna berdasarkan *raw social events* atau fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian pekerja media mengonstruksikan makna dari *raw social events* menggunakan aturan dan kode profesional yang dimiliki oleh

institusi media tersebut. Pembuat teks dalam penelitian ini adalah TVRI, maka kode profesionalnya adalah konsep Lembaga Penyiaran Publik dan regulasi yang mengikatnya. Hasil dari pengonstruksian makna ini kemudian menjadi suatu program acara yang disiarkan kepada audiens. Hasil dari proses pengonstruksian makna ini disebut sebagai *meaning structure 1*. Momen pertama ini disebut *encoding* sebab proses encoding tidak hanya memproduksi pesan, tapi juga sekaligus membawa makna dalam pesan tersebut dan dapat terjadi secara sadar ataupun tidak disadari.

Momen yang kedua, yaitu makna dan pesan ada dalam diskursus yang terbuka untuk dimaknai dengan berbagai cara (polisemi), momen ini disebut '*meaningful*' discourse.

Sedangkan momen ketiga adalah momen *decoding* audiens. Menurut Hall konsumsi bukanlah tindakan pasif, sebab konsumsi memerlukan penghasilan makna, makna tersebut tidak hanya diterima namun diciptakan sendiri. Hall menjelaskan bahwa:

The consumption or reception of the television message is thus also itself a "moment" of the production process in its larger sense, though the latter is "predominant" because it is the "point of departure for the realization" of the message. Production and reception of the television message are not, therefore, identical, but they are related: they are differentiated moments within the totality formed by the social relations of the communicative process as a whole (Ibid, 165)

Konsumsi atau resepsi terhadap pesan merupakan juga momen dari proses produksi dalam konteks yang lebih luas. Tahap ini lebih dominan karena ini adalah 'titik berangkat untuk realisasi' pesan (*'point of departure for the realization' of the message*). Produksi dan resepsi dalam

sebuah pesan televisual tidak identik, tetapi berelasi: keduanya adalah momen yang berbeda dalam sebuah bentukan oleh relasi sosial proses komunikasi secara keseluruhan.

Perbedaan “momen” pada tahap produksi dan konsumsi (resepsi) mengakibatkan makna yang dihasilkan melalui “*meaning structure 1*” dan “*meaning structure 2*” mungkin berbeda. Mereka tidak merupakan suatu “*immediate identity*”. Kode *encoding* dan *decoding* mungkin tidak simetris. Tingkat simetris, yaitu tingkat “*understanding*” dan “*misunderstanding*” dalam pertukaran komunikatif tergantung pada simetris / asimetris (hubungan kesetaraan) yang dibentuk antara posisi dari “personifikasi”, encoder-decoder-produser dan penerima. Selain itu, pemahaman suatu teks selalu berasal dari sudut pandang orang yang membacanya, tidak hanya melibatkan reproduksi makna tekstual, namun juga produksi makna baru oleh para pembacanya. Teks mungkin menstrukturkan makna dengan mengarahkan pembaca, namun ia tidak bisa menetapkan makna, karena makna ditetapkan melalui interaksi antara teks dan imajinasi audiens.

Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi perbedaan *decoding* pada audiens, Hall meminjam model Parkin dalam melihat posisi *decoding* audiens, yakni: Pertama, posisi dominan-hegemonik (*the dominant-hegemonic position*) yaitu pemaknaan audiens sejalan dengan kode-kode program yang di dalamnya mengandung nilai, sikap, keyakinan, dan secara penuh menerima makna dari encoders (media atau pembuat

program). Kedua, posisi negosiasi (*the negotiated code or position*) yaitu audiens cukup memahami makna dari encoders, namun audiens menggunakan logika mereka sendiri untuk memaknai pesan yang mereka konsumsi. Ketiga, posisi oposisional (*the oppositional code*) yaitu audiens mengerti makna dari encoders, tapi mereka mampu menginterpretasi makna secara berbeda dari makna yang disampaikan encoder.

Peneliti akan menggunakan tiga posisi *decoding* audiens ini untuk melihat posisi *decoding* audiens dalam menginterpretasi teks Program Acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik.

3. *Public Service Broadcasting*

McQuail (2000) mendefinisikan *Public Service Broadcasting* sebagai sistem penyiaran yang didanai publik dan dioperasikan dengan cara non-profit, dan oleh hukum diwajibkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi semua warga negara, serta bertujuan untuk memberikan layanan kepada publik. Akar *Public Service Broadcasting* umumnya dapat ditelusuri dari dokumen Royal Charter tentang pembentukan British Broadcasting Corporation (BBC) pada tanggal 1 Januari 1927 yang dicetuskan oleh John Reith. Menurut Reith, pelayanan penyiaran publik harus berusaha untuk menginformasikan dan mencerahkan publik serta menghibur mereka dengan program-program dari nilai-nilai pelayanan publik, seperti: Pemrograman untuk

keanekaragaman, kewarganegaraan, minoritas dan identitas nasional. Salah satu tujuan dasar dari sistem penyiaran publik harus memperkuat proses demokrasi dengan memberikan informasi, mempromosikan debat dan diskusi tentang semua isu-isu vital dan menyediakan platform bagi interaksi antara orang-orang biasa dan pembuat kebijakan. Selain itu, juga diharapkan untuk mempromosikan dan mengembangkan keragaman budaya bangsa.

- Konsep Kunci PSB

Sedangkan, UNESCO (Mendel, 2011:9-17) menyajikan konsep standar kunci media penyiaran publik berupa:

- a) Kebebasan Berekspresi: Hak untuk kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 19 dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR), 12 sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk hak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa batas.”
- b) Pluralisme dan keberagaman: Pluralisme dan keberagaman di media adalah prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Kebutuhan pluralitas mengalir dari hak untuk mencari dan menerima informasi serta ide-ide. Ini berpusat pada aspek hak kebebasan berekspresi yakni, gagasan bahwa warga negara harus memiliki akses ke berbagai perspektif yang berbeda dan

analisis melalui media, dengan kata lain, akses ke beragam media. Ini dilakukan melalui ketersediaan berbagai sudut pandang bahwa individu dapat memilih perspektif bersaing karena mereka terlibat dalam pengambilan keputusan publik sebagai warganegara.

- c) Independensi: Ada sejumlah bidang di mana regulasi negara dan / atau pengawasan yang tepat dalam kaitannya dengan penyiaran. Perizinan penyiaran diperlukan untuk memastikan penggunaan tertib gelombang udara dan harus ada pengawasan dari lembaga penyiaran publik, antara lain untuk memastikan penggunaan pendanaan publik yang tepat. Prosedur perizinan dan pengawasan lembaga penyiaran publik yang diatur dengan jaminan kebebasan berekspresi. Kekuasaan pengawasan harus dilindungi dari kontrol pemerintah dan pengaruh komersial yang tidak semestinya. Hal ini memerlukan perlindungan khusus, baik yang bersifat hukum dan praktis, terhadap politik, komersial dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Ini prinsip umum dan mendapatkan dukungan yang kuat dalam keputusan internasional. Misalkan dalam Deklarasi Afrika yang menyatakan, sangat jelas, Prinsip VII (1): “Setiap otoritas publik yang berpusat di bidang penyiaran atau telekomunikasi harus memiliki regulasi independen dan memadai agar

terlindung dari gangguan, terutama yang bersifat politik atau ekonomi.

- d) Pendanaan: Standar internasional, serta praktik nasional, menetapkan dengan jelas bahwa keuangan publik yang menyediakan dukungan untuk lembaga penyiaran publik sangat penting untuk keberhasilan menjalankan tugas dan fungsinya.

Prinsip media penyiaran publik (World Radio and Television Council, 2000) antara lain :

- a) Universalitas: Umumnya penyiaran harus dapat diakses oleh setiap warga di seluruh negeri. Ini adalah prinsip egaliter dan demokratis yang bertujuan untuk menempatkan semua warga negara pada pijakan yang sama, apapun status sosial dan pendapatan mereka. Ini memaksa lembaga penyiaran publik untuk menjangkau seluruh penduduk dan berusaha untuk "digunakan" dengan jumlah kemungkinan terbesar. Ini tidak berarti bahwa penyiaran publik harus mencoba untuk mengoptimalkan rating pada semua sasaran, tidak seperti penyiaran komersial, melainkan bahwa harus berusaha untuk membuat seluruh program yang dapat diakses oleh seluruh penduduk. Hal ini tidak semata-mata melibatkan aksesibilitas teknis, tetapi memastikan bahwa setiap orang dapat mengerti dan mengikuti program tayangannya.

b) Keragaman: Layanan yang ditawarkan oleh penyiaran publik harus diversifikasi, setidaknya dalam tiga cara: dalam hal genre program yang ditawarkan, para penonton yang ditargetkan, dan subyek yang dibahas. Penyiaran publik harus mencerminkan keragaman kepentingan publik dengan menawarkan berbagai jenis program, mulai dari siaran berita untuk program ringan. Beberapa program mungkin ditujukan bagi sebagian dari masyarakat, yang bervariasi. Pada akhirnya, penyiaran publik harus menjangkau semua orang, bukan melalui masing-masing program, tetapi melalui semua program dan keanekaragaman mereka. Melalui keragaman subyek yang dibahas, penyiaran publik juga dapat berusaha untuk menanggapi beragam kepentingan masyarakat dan mencerminkan berbagai macam isu-isu di masyarakat.

c) Kemerdekaan: Umumnya penyiaran adalah forum di mana ide-ide harus diekspresikan secara bebas, di mana informasi, pendapat dan kritik beredar. Ini hanya mungkin jika menjunjung kemerdekaan dalam berpendapat. Oleh karena itu, kebebasan penyiaran publik dipertahankan terhadap tekanan komersial atau pengaruh politik. Jika Program siaran masyarakat yang dirancang untuk tujuan komersial, maka orang tidak akan mengerti mengapa mereka diminta untuk

membiayai layanan yang programnya tidak substansial berbeda dari layanan yang diberikan oleh lembaga penyiaran swasta.

- d) Kekhasan: Kekhasan mensyaratkan bahwa layanan yang ditawarkan oleh penyiaran publik membedakan dirinya dari jasa penyiaran lainnya. Dalam program layanan publik, kualitas dan karakter masyarakat tertentu harus mampu mengidentifikasi apa yang membedakan layanan ini dari layanan lain.

Fungsi sosial media penyiaran publik menurut Laswell yakni:

- a) Pengawas sosial, yaitu merujuk kepada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang obyektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- b) Korelasi sosial, yaitu merujuk kepada upaya pemberian informasi dan interpretasi yang menghubungkan satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus.
- c) Sosialisasi, yaitu upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

4. Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia

Pada dasarnya konsep Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia memuat aspek kebutuhan publik, partisipasi publik, pemersatu bangsa, kekhasan, dan independensi yang semuanya tercantum dalam PP No. 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPP.

a) Kebutuhan Publik

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa, Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat independen, netral, dan tidak komersial. Penjelasannya meliputi: independen yaitu tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Netral yaitu tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan: RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

b) Partisipasi Publik

Pasal 3 ayat 2 PP No.11 Tahun 2005 menyebutkan: RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik

berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Pemersatu Bangsa

Pasal 4 menyebutkan, bahwa RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

d) Kekhasan

Selanjutnya mengenai kekhasan Lembaga Penyiaran Publik diatur pada PP No.11 Tahun 2005 Pasal 18 tentang ketentuan isi siaran, yakni: Ayat (1) Isi siaran TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal televisi wajib memuat paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri. (2) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan Lembaga Penyiaran Publik dimaksud wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. (3) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (4) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang: bersifat fitnah,

menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(5) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilarang memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

(6) Isi siaran RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

(7) Isi siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPI.

e) Independensi

Berbeda dari aspek lainnya, nilai independensi secara khusus tercantum pada PP No.13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Pasal 34 ayat 1 menyebutkan, untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari: iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan masyarakat, dan siaran iklan. Pembiayaan operasional TVRI utamanya bersumber dari iuran publik, sehingga TVRI mempertanggungjawabkan kegiatan penyiaran kepada publik. Sedangkan ayat 3 menyebutkan,

anggaran biaya operasional TVRI setiap tahun disetujui oleh Menteri Keuangan atas usul dewan direksi.

Sumber dana yang berasal dari APBN ini berpengaruh pada mekanisme operasional TVRI, karena melibatkan otoritas pemerintah dan parlemen dalam perumusan rencana kerja dan anggaran TVRI. Pasal 37 menyatakan (1) TVRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri. (2) TVRI wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri. (3) TVRI wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Peneliti akan menggunakan konsep Lembaga Penyiaran Publik sebagai pedoman dalam mengidentifikasi kode-kode dominan teks program acara Liga Italia Serie A di TVRI.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana interpretasi audiens terhadap program

acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik. Maka, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif “lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman tentang bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi” (Pawito, 2007:36). Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai “proses investigatif yang di dalamnya peneliti secara perlahan memaknai suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, menggandakan, mengatalogkan, dan mengklasifikasikan objek penelitian” (Creswell, 2010:292).

Pada dasarnya penelitian kualitatif mendasarkan bukti pada hal-hal yang bersifat diskursif seperti transkrip wawancara, dokumen tertulis, catatan lapangan, yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk narasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena dan berupaya menariknya ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007: 68). Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian audiens yang dalam tahap pencarian bukti didasarkan pada proses interaktif antara peneliti dengan informan.

2. Kriteria Informan

Subyek penelitian ini adalah Publik di Indonesia penonton Liga Italia Serie A di TVRI, mengingat tayangan program acara Liga Italia

Serie A disiarkan oleh TVRI yang merupakan Lembaga Penyiaran Publik. Dalam penelitian resepsi audiens, cara pandang audiens dalam menerima makna teks media, tentu berbeda berdasarkan konteksnya, oleh karena itu peneliti membutuhkan beberapa orang informan. Informan akan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* (Patton, 2002), yakni peneliti dengan sengaja memilih informan berdasarkan kebijaksanaan peneliti. Teknik *purposive sampling* memiliki ciri (Alston dan Bowles, 2003: 90):

- a) Sampel dipilih untuk tujuan tertentu;
- b) Sampel memberikan wawasan tentang sebuah isu terkait dengan area studi;
- c) Jumlah sampel ditentukan oleh peneliti berdasarkan topik riset.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana audiens memaknai Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik. Maka informan dalam penelitian ini harus memenuhi syarat bahwa mereka adalah penonton program acara Liga Italia Serie A. Menurut Jensen (1991:139) resepsi audiens adalah “membandingkan analisis tekstual *media discourse* dan *audiens discourse*, yang hasilnya ditafsirkan dan mengacu pada konteks.” Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi hasil, maka informan ditentukan berdasarkan perbedaan latar belakang tingkat pendidikan dan pekerjaan. Sebab peneliti berasumsi

bahwa kedua faktor inilah yang mampu memberikan penjelasan berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman mereka dalam menonton program acara televisi. Latar belakang audiens secara langsung membangun kehidupan individu dan pengalamannya bersama media. Terdapat hubungan antara latar belakang audiens dengan bagaimana mereka memaknai pesan media (Croteau & Hoynes, 2000: 268).

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kriyantono (2006:41-42), data dapat dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan sumbernya, yaitu:

- a) Data Primer: data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Data ini termasuk data mentah yang harus diproses kembali sehingga dapat menjadi sumber informasi yang bermakna.
- b) Data Sekunder: data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Sebagai data pelengkap, data sekunder dapat membantu peneliti jika terdapat keterbatasan data yang sebelumnya sudah diperoleh peneliti.

Resepsi audiens tidak menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, tetapi menggunakan metode kualitatif *in-depth interview* untuk mendapatkan interpretasi audiens terhadap pesan media (Downing et.al, 1995: 215-216). Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *in-depth interview* atau wawancara

mendalam sebagai data primer. Teknik wawancara mendalam digunakan karena memungkinkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan informan untuk mendapatkan jawaban yang detail dari interpretasi informan terhadap program acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik. Tipe wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semi-structured interviews*. Peneliti menggunakan *interview guide* sebagai panduan pertanyaan bagi informan. *Interview guide* dalam hal ini hanya berisi garis besar tentang informasi yang ingin didapatkan, sehingga informan dapat mengembangkan sendiri ide mereka dalam menanggapi pertanyaan.

Sedangkan untuk data sekunder, peneliti melakukan studi dokumentasi dan kepustakaan. Studi dokumentasi digunakan untuk melihat bagaimana komentar Direktur TVRI terhadap wacana Liga Italia Serie A di TVRI. Studi kepustakaan digunakan untuk melihat penelitian sebelumnya tentang problem TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

4. Tahap Analisis Data

Penelitian tentang resepsi audiens sejatinya melihat khalayak sebagai partisipan aktif dalam membangun dan menginterpretasi makna. Oleh karenanya analisis penelitian ini berfokus pada *Encoding-Decoding* model Stuart Hall. Teks dalam model *encoding/decoding* (Nightingale, 1996:31) diartikan sebagai struktur penanda yang terdiri dari tanda dan kode yang penting bagi komunikasi, teks dapat berbentuk

tulisan, dialog, film, pakaian, program acara, gestur, dan sebagainya. Maka data pada tahap *encoding* ini berasal dari teks program acara Liga Italia Serie A di TVRI.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a) Menentukan teori, definisi konsep-konsep yang dipakai, serta metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini.
- b) Mengidentifikasi *encoding* program acara Liga Italia Serie A di TVRI
- c) Menyusun *interview guide*
- d) Memilih informan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- e) Mewawancari informan.
- f) Menyusun transkrip wawancara.
- g) Menganalisis hasil wawancara dan mengidentifikasi posisi pembacaan informan dengan memasukkannya ke dalam posisi pembacaan dominan-hegemonik (*preferred reading*), negosiasi (*negotiated reading*), atau oposisional (*oppositional reading*).

Selanjutnya pada tahap *decoding* peneliti akan berfokus pada resepsi audiens terhadap program acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik. Hal ini mengenai bagaimana publik menginterpretasikan isi media, memberikan makna atas pemahamannya dan pengalamannya. Analisis pada tahap ini berdasarkan data yang didapat melalui *in-depth interview* pada informan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan tiga langkah dalam menganalisis data, yaitu:

- a) Reduksi data: reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan data. Peneliti melakukan seleksi data yang didapat dari lapangan, kemudian mencari data yang relevan dengan masalah dalam penelitian, dan mereduksi data yang dianggap tidak perlu.
- b) Penyajian data: data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk yang mudah dipelajari dan dibaca. Dalam penelitian *decoding* dengan model yang dikembangkan oleh Stuart Hall, data diklasifikasikan ke dalam posisi pembacaan dominan, negosiasi, atau oposisional. Peneliti mengidentifikasi posisi resepsi audiens ini dengan beberapa cara, yaitu:
 - Melihat seberapa besar derajat kesimetrisan-ketidaksimetrisan sikap informan dengan encode teks program acara Liga Italia Serie A di TVRI.
 - Membandingkan level penerimaan/penolakan encode teks program acara Liga Italia Serie A di TVRI antar-informan.
 - Menggunakan sudut pandang encoder untuk mengidentifikasi konsep Lembaga Penyiaran Publik dalam program acara Liga Italia Serie A di TVRI.

Encode program acara Liga Italia Serie A yang dimaksud di sini adalah manifestasi kode kode dominan konsep Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia dalam program acara Liga Italia Serie A di TVRI. Semakin besar derajat kesimetrisan informan dengan encode teks dan semakin tinggi level penerimaannya dibandingkan dengan informan lain, semakin besar kecenderungannya dalam posisi dominan. Sebaliknya, semakin besar derajat kesimetrisan sikap informan dengan encode teks dan semakin tinggi level penolakannya dibandingkan dengan informan lain, semakin besar kecenderungan informan ke arah posisi pembacaan oposisional.

- c) Menarik kesimpulan atau verifikasi: penarikan kesimpulan pada dasarnya sudah dapat dimulai saat peneliti masih dalam tahap pengumpulan data walau kesimpulan tersebut sifatnya sementara. Kemudian peneliti meningkatkan kesimpulan melalui reduksi dan penyajian data. Kesimpulan yang sudah dapat dianggap sebagai kesimpulan final, selanjutnya harus diverifikasi dahulu, diuji kebenarannya, dan relevansinya dengan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan menghubungkan posisi pembacaan audiens dengan latar belakang faktor yang mempengaruhi interpretasi audiens terhadap program acara Liga Italia Serie A di TVRI tentang konsep Lembaga Penyiaran Publik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memaparkan gambaran secara umum tentang obyek dan wilayah penelitian, dalam hal ini adalah TVRI.

BAB III berisi tentang hasil temuan penelitian, hasil analisis, interpretasi data dan diskusi

BAB IV berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran penelitian untuk perbaikan dalam kegiatan penelitian selanjutnya.